



Radar Bali



HUMAS PEMKAB BADUNG FOR RADAR BALI

PETUNJUK: Bupati Gde Agung bersama Wabup Sudiana, Ketua DPRD Nyoman Giri Prasta, Wakil Ketua DPRD I Ketut Suiasa, dan I Made Sunarta dan Sekkab Kompyang R. Swandika di saat menerima anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar bersama Kepala Auditor VI BPK RI dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, kemarin.

Anggota VI BPK RI Beri Arahan Tata Kelola Keuangan

ANGGOTA VI BPK RI Bahrullah Akbar memberikan pengarahan terkait peningkatan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Badung, Kamis (23/4) kemarin. Kehadiran Anggota VI BPK RI bersama Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjafrudin Mosii serta didampingi dua orang Tenaga Ahli VI BPK RI yakni Achmad Djazuli dan Aditya Wicaksana ini, disambut Bupati Badung A.A. Gde Agung, Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta, Wabup. I Made Sudiana dan Sekda Badung Kompyang R. Swandika di Puspem Badung. Hadir pula Kepala Auditor VI BPK RI, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali Arman Syfa, Pimpinan DPRD Badung, Ketua Komisi, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Badan Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Badung serta SKPD dilingkungan Pemkab. Badung. Dalam pengarahannya Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar memaparkan tentang pentingnya akrual basis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik sehingga arah dan manfaat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah itu betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel membutuhkan sebuah komitmen kuat dari kepala daerah/bupati untuk dapat merubah pola pikir dan mendorong jajaran SKPD khususnya pengelola keuangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Sementara itu Bupati Gde Agung menyambut baik kehadiran anggota VI BPK RI untuk memberikan pengarahan terkait tata kelola keuangan daerah. Bupati mengakui, di Badung mulai tahun 2015 ini telah menggunakan sistem akrual basis, sehingga dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang lebih baik dari sebelumnya. "Di pemerintahan kabupaten badung baik eksekutif maupun legislatif, sejak awal sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan- penyimpangan antara lain : proses perencanaan APBD sudah tepat waktu dalam penetapan APBD, dalam penyusunan anggaran sudah berdasarkan standar satuan harga dan Analisis Standar Belanja (ASB), dari aspek pengadaan barang dan jasa, kami telah menerapkan e-procurement yang ditunjang dengan keberadaan ULP dan LPSE," jelas Bupati.

Lebih lanjut dijelaskan, terhadap postur APBD kabupaten badung tahun 2015, dari sisi pendapatan, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 79,41 persen, dari sisi belanja, menunjukkan untuk belanja publik sebesar 66,44 persen dan belanja aparatur sebesar 33,56 persen serta belanja modal 28,05 persen. Sedangkan alokasi untuk anggaran pendidikan sebesar 21,66 persen dan anggaran kesehatan sebesar 12,32 persen. (adv)

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 24



Bupati Geredeg Soroti Baliho Balon

Pemkab Karangasem Siap Dukung Pilkada

AMLAPURA- Aura Pilkada Karangasem, 9 Desember 2015, sudah mulai terlihat jelas di Karangasem. Bakal calon (balon) bupati/wakilnya sudah gencar promosi, terutama memasang melalui baliho maupun spanduk. Kondisi itu pun, menjadi sorotan Bupati Karangasem I Wayan Geredeg. Sorotan itu disampaikan Bupati Geredeg, saat acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Karangasem dengan KPUD Karangasem tentang Belanja Hibah Penyelenggara Pilkada 2015, di ruang pertemuan Bupati Karangasem, Kamis (23/4).

"Sudah banyak baliho, apakah tidak mencuri start? Apakah



KADEK MERTAWAN/RADAR BALI

SONGSONG PILKADA: Bupati I Wayan Geredeg (kanan) saat penandatanganan NPHD dengan KPUD, kemarin.

sudah boleh? Kalau iya, di mana saja," kata Bupati Geredeg, saat acara yang dihadiri semua komisioner KPUD Karangasem.

Termasuk juga hadir Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, Sekkab Karangasem I Gede Adnya Mulyadi, serta

pejabat terkait lainnya. "Kalau saat mengucapkan selamat hari Raya Nyepi, itu masih wajarlah, tapi yang tidak itu," imbuhnya.

Bupati Geredeg berharap keberadaan baliho itu, supaya tidak menimbulkan gesekan, terutama antara mereka yang ingin mencalonkan diri menjadi bupati lima tahun ke depan. Selain itu, Bupati Geredeg juga berharap, keberadaannya agar tidak berdampak terhadap Karangasem, yang sedang dinilai Tim Adipura. "Saya hanya mengingatkan. Harus main aturan, tidak saling seruduk, harus ada aturan jelas," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua KPUD Karangasem I Made Arnawa berjanji bakal berkoordinasi dengan KPUD Provinsi, dan pusat. Supaya langkah yang diambil, tidak menimbulkan konflik. Sementara itu, terkait ang-

garan Pilkada Karangasem, ditetapkan sebesar Rp 13,97 miliar di ABPD Induk 2015. Sedangkan APBD perubahan sebesar Rp 1,67 miliar. Arnawa mengakui, anggaran itu sudah sangat mendesak dicairkan. Karena KPUD sudah mulai tahapan Pilkada. "Kami sudah mulai tahapan, tidak ada uang, tidak bisa bekerja. Ini khusus yang APBD induk," ujar Arnawa, seraya menyebutkan APBD perubahan perlu sokongan dana dari Pemkab Karangasem sebesar Rp 1,6 miliar.

Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi, mengatakan, acara kemarin, merupakan bukti kesiapan Pemkab Karangasem, menyongsong Pilkada Karangasem 2015. "Dengan anggaran ini, Pemda sudah siap Pilkada," kata Adnya Mulyadi. (wan/han)

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 27



Radar Bali

CPNS TABANAN

Jagrem Dicecar 60 Pertanyaan

TABANAN - Kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan memasuki tahap akhir. Pasalnya Mantan Kabid Angkutan DKP I Gede Jagrem dan Kasubag Kepegawaian DKP Candra Dewi yang disebut-sebut meminta sejumlah uang kepada CPNS di DKP kini diperiksa Kejari Tabanan. Keduanya diperiksa masih berstatus sebagai saksi, Jumat, (23/4).

Jagrem yang kini menjabat sebagai Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker dan Candra Dewi datang ke Kejari Tabanan sekitar pukul 13.00 dan langsung dihadapkan dengan penyidik dari Kejari Tabanan. Kehadiran Jagrem dan Candra Dewi ditemani pengacaranya yakni I Gede Wija Kusuma, Ni Nengah Saliani dan Putu A. Hutagalung.

Terkait pemeriksaan kedua pejabat tersebut, Kasipidsus Kejari Tabanan, Fathur Rohman menegaskan mereka dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemersan di DKP Pemkab Tabanan. "Keduanya diperiksa sekitar 4 jam lebih dari pukul 13.00 hingga pukul 17.30 wita," ucapnya ■

► Baca Jagrem... Hal 35

Sudah Periksa 42 Saksi

■ JAGREM...

Sambungan dari hal 21

Masih menurut Fathur, untuk saksi Jagrem pihak penyidik mengajukan sekitar 60 buah pertanyaan soal kisruh CPNS di DKP Tabanan. Sementara Candra Dewi penyidik mengajukan sedikitnya 24 buah pertanyaan. "Pak Jagrem ditanya sekitar 60 pertanyaan, sedangkan Candra Dewi sekitar 24 pertanyaan," ungkapinya.

Apakah kedua pejabat ini akan menjadi tersangka? Ditanya demikian Fathur men-

gaku belum sejauh itu, karena semua tergantung dari alat bukti yang telah dikumpulkan pihaknya terkait kasus ini. "Belum sejauh itu, yang jelas hari ini (kemarin) keduanya kita periksa statusnya sebagai saksi, soal bagaimana nanti itu tergantung dari alat bukti yang ada," tandas Fathur.

Sementara I Gede Wija Kusuma saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya datang ke Kejari Tabanan dalam rangka mendampingi kliennya yang diperiksa terkait kisruh CPNS di DKP beberapa waktu lalu.

"Kami hadir mendampingi klien kami yang diperiksa sebagai saksi," tegasnya.

Adapun meteri pemeriksaan, kata Wija masih seputar dugaan percobaan pemerasan CPNS di lingkungan DKP. "Materinya ya seputar pengulangan pemeriksaan sebelumnya. Karena sebelumnya klien kami juga pernah dimintai keterangan, meterinya seputar pemeriksaan tersebut," beber Wija Kusuma.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa terbongkarnya kasus ini berawal dari penga-

kuan salah satu staf DKP yang dimintai uang sekitar Rp 60 juta jika ingin mendapatkan SK CPNS-nya. Padahal untuk mendapatkan SK yang merupakan hak para pegawai itu tidak seharusnya membayar. Pengakuan para pegawai itu mereka dimintai yang oleh salah seorang pejabat DKP. Kasus inilah yang tengah dibuktikan oleh pihak kejaksaan. Hingga kini, Kejari Tabanan mengaku telah memeriksa sekitar 42 orang saksi yang diduga berkaitan dengan kasus ini. (gin/yes)

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 21 dan 35



Radar Bali

Mau Diperiksa, Winasa Masuk RS

Terkait Kasus Dugaan TPPU

NEGARA - Rencana penyidik Polda Bali untuk memeriksa mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) pembelian mesin pengolah sampah organik menjadi pupuk kompos tahun 2008-2009 lalu, Winasa mendadak sakit. Ia dua kali dilarikan ke RSUD Negara sebelum akhirnya dirawat di Puri Rahayu, RSUD Negara.

Informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan, Winasa mengalami sakit sejak Rabu malam (22/4). Sekitar pukul 22.00, tiba-tiba Winasa merasa kepalanya berputar-putar dan mual-mual. Setelah dilaporkan kepada petugas jaga Rumah Tahanan Negara (Rutan) Negara, ia langsung dilarikan ke UGD RSUD Negara sekitar pukul 23.00. Namun, setelah diperiksa dan dilakukan observasi, Winasa akhirnya dikembalikan ke Rutan Negara sekitar pukul 24.00 ■

► Baca Mau... Hal 35

Winasa Dalam Belitan Kasus

Kesehatan Winasa

- Berdasarkan riwayat medis memang ada tensi tinggi dan jantung.
- Dari hasil pengecekan tensi saat di IRD masih 160/110.
- Sebelumnya sempat mencapai 180/110 saat diperiksa di rutan.
- Winasa selanjutnya dirawat di ruang VIP Puri Rahayu No. 11 RSUD Negara

Kasus TPPU

- Sebelum sakit, Winasa rencananya mau diperiksa penyidik Polda Bali sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
- Kasus ini sempat dihentikan setelah PN Denpasar membebaskan Winasa dalam kasus korupsi pengadaan mesin kompos.

- Setelah MA menjatuhkan hukuman 2,5 tahun, polda kembali bergerak mengejar kasus TPPU.
- Polda telah menyita sebuah vila milik warga Jepang, Kazuyuki Tsurumi di Desa Pekutatan, Jembrana. Tsurumi sendiri saat ini menjadi DPO Polda Bali. Vila itu berdiri di atas lahan seluas 2,1 hektare yang diduga dibeli dari hasil korupsi pengadaan mesin kompos.

- Polda Bali juga telah menyita satu unit mobil Mercedes Benz seri E 320 tahun 1997.



GRAFIS: DYAH FEDIAWATI/RADAR BALI



Radar Bali

Kasusnya Sempat "Berhenti"

■ MAU...

Sambungan dari hal 21

Meski sudah diperiksa dan diberi obat, sekitar pukul 10.00, kemarin (23/4), Winasa kembali mengalami sakit. Ia muntah-muntah dan memegang kepalanya yang sakit. Petugas Rutan Negara lalu melarikannya ke UGD RSUD Negara sekitar pukul 10.00 untuk mendapat perawatan. Setelah diperiksa, ternyata Winasa menderita komplikasi. Tekanan darahnya mendadak tinggi dan ia menderita vertigo yang cukup parah.

"Karena diketahui menderita penyakit vertigo dan tekanan darahnya meningkat, ia diberi kesempatan berobat di RSUD Negara. Hasil observasi juga menunjukkan Winasa harus menjalani rawat inap di RSUD Negara," terang Kepala Rutan Negara Arimin didampingi Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Nyoman Tulus yang dikonfirmasi, kemarin.

Direktur RSUD Negara dr. Made Dwipayana yang dikonfirmasi terpisah membenarkan Winasa saat ini dirawat di Puri Rahayu. Menurut Dwipayana, Winasa mengalami komplikasi beberapa penyakit dan akan menjalani masa observasi selama dua hari. Setelah itu, perawatan Winasa akan dievaluasi.

"Selama dua hari ini kami akan melakukan observasi. Apabila kondisinya membaik dan diperbolehkan dokter untuk pulang, kami akan mengembalikannya ke Rutan Negara. Namun, apabila dalam dua hari ini kondisinya memburuk dan harus dirujuk

ke RSU Sanglah, kami akan merujuknya ke sana," katanya.

Dikatakan, perawatan ke RS Sanglah ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui secara rinci penyakit yang dideritanya. Karena selama ini perawatan Winasa dilakukan dokter di RS Sanglah. Namun, ia berharap dalam dua hari ini kondisi kesehatan Winasa membaik sehingga ia bisa beraktivitas kembali seperti biasa di rutan.

Menurut putri Winasa, Ni Komang Marina, ayahnya merasakan mual dan pusing serta muntah-muntah. Tensi Bapak tinggi. Dokter jaga IRD RSUD Negara Laksmi Damayanti mengatakan berdasarkan riwayat medis memang ada tensi tinggi dan jantung. Dari hasil pengecekan tensi saat di IRD masih 160/110. Sebelumnya sempat mencapai 180/110 saat diperiksa di rutan. Winasa selanjutnya dirawat di ruang VIP Puri Rahayu No. 11 RSUD Negara.

Meski secara medis Winasa menderita vertigo dan tekanan darah tinggi, namun menurut perkiraan psikis, Winasa sakit setelah mengetahui akan diperiksa penyidik Polda Bali dalam kasus TPPU. Tindakan ini berkaitan dengan pembelian mesin pengolah sampah organik menjadi pupuk kompos di Dusun Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara yang menghukum Winasa dengan pidana penjara 2,5 tahun.

Guna melakukan pemeriksaan terkait kasus TPPU tersebut, kemarin tim penyidik Polda Bali (Reskripsus) dipimpin Kopol Ida Bagus Wedanajati mendatangi Rutan Negara sekitar pukul 13.00. Winasa

menurut rencana diperiksa sebagai tersangka kasus TPPU tersebut. Berkas kasus ini sudah P19 dan akan dilengkapi dengan pemeriksaan tambahan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum di Kejati Bali.

Namun, setelah mengetahui Winasa sakit dan dirawat di RSUD Negara, tim ini langsung menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara guna melakukan koordinasi. Wedanajati yang ditemui usai bertemu Kasi Pidsus Putu Sauca Arimbawa Tusan mengatakan, ia melakukan koordinasi untuk menggunakan beberapa alat bukti yang sudah digunakan dalam kasus pembelian mesin kompos yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,029 miliar lebih. Pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas Winasa sebagai tersangka kasus TPPU.

Kasus pembelian mesin pengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dari Jepang tersebut berawal dari rencana Winasa memajukan pertanian di Jembrana. Ia menggagas pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos untuk membantu petani. Gagasan itu disampaikan kepada Direktur PT Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang Kazuyuki Tsurumi. Ia bersama Prof. Inoue lalu membuat proposal pengadaan mesin kompos dan disampaikan kepada Winasa.

"Diduga, keuntungan dari pembelian mesin pengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, digunakan untuk membeli tanah seluas 2,1 hektare di Desa Pekutatan. Di atas tanah ini sudah dibangun vila milik Kazuyuki Tsurumi yang kini menjadi buronan Polda

Bali," kata sumber koran ini.

"Vila tersebut sebelumnya sudah disita penyidik Polda Bali. Namun, setelah majelis hakim PN Negara menjatuhkan vonis bebas kepada Winasa dalam kasus pembelian mesin kompos, kasus ini sempat dihentikan. Namun, setelah MA menghukum Winasa 2,5 tahun, kasus ini dilanjutkan lagi," kata Wedanajati.

Menurut informasi, tanah yang digunakan untuk membangun vila itu disebut-sebut dibeli menggunakan keuntungan dari pembelian mesin pengolah sampah organik menjadi pupuk kompos di Lingkungan Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara. Karena pemilik villa yang juga warga Jepang Kazuyuki Tsurumi merupakan rekanan pembelian mesin kompos. Itu sebabnya hingga saat ini Tsurumi masih menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polda Bali.

Awalnya, vila tersebut diperuntukan bagi warga Jepang khusus jompo. Mereka boleh menempati vila dengan sistem sewa tahunan. Rencananya, akan dibangun 30 unit vila di sana, tetapi setelah kasus ini mencuat, pembangunan dihentikan. Tercatat baru sekitar enam unit bangunan untuk vila didirikan di lokasi tersebut. Di antaranya sempat digunakan Kazuyuki Tsurumi.

Vila ini sempat disegel lantaran dana yang digunakan untuk membeli vila tersebut diindikasikan merupakan TPPU dari transaksi pembelian mesin kompos. Selain tanah, satu unit mobil Mercedes Benz seri E 320 tahun 1997 juga turut disita Polda Bali. (don/yes)

Edisi : Jumat, 24 April 2015

Hal : 35



Radar Bali

Ashari: Akan Ada Tersangka Baru

Terkait Dugaan Korupsi Undiksha

DENPASAR - Kejati Bali berjanji tidak akan berhenti pada penetapan dua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Hal itu diungkapkan Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan, kemarin (23/4) ■

► Baca **Ashari...** Hal 35



Intinya akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus (pengadaan lahan Undiksha, Red) ini. Namun kami tidak bisa jelaskan nama - namanya."

Ashari Kurniawan
Kasipenkum Kejati Bali

Tim Kejati Sempat Cek Lokasi

■ ASHARI...

Sambungan dari hal 21

"Intinya akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus (pengadaan lahan Undiksha, Red) ini. Namun kami tidak bisa jelaskan nama - namanya," ungkapnya. Dia juga mengatakan, saat ini masih pendalaman untuk proses penetapan tersangka lagi. "Pada saatnya kami sampaikan," kilahnya.

Bagaimana dengan hasil pengeledahan? Dia mengatakan tim baru sampai dari Buleleng pukul 11.00 kemarin. Setelah melakukan pengeledahan di Undiksha, tim menginap di Buleleng. "Pukul 08.00 berangkat dari Buleleng tadi (kemarin), sampai pukul 11.00 di kantor," ungkapnya.

Dia mengatakan, proses pengeledahan dilakukan di Undiksha, atau di gedung rektorat. Dengan pola tim menunggu di ruang rektor, kemudian meminta data - data yang diperlukan dalam kasus ini.

Sehingga data - data terkait pengadaan lahan di Jineng Dalem sudah didapatkan. Bahkan Ashari mengatakan Jaksa juga melakukan pengecekan

lokasi ke Jinengdalem. "Sempat ke lokasi juga. Lokasi lahannya di Jinengdalem," jelasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus ini, Kejati Bali telah menetapkan IWS dan NM sebagai tersangka. Ini terkait pembelian lahan tanah seluas 15 hektare di daerah Jinengdalem, Singaraja, untuk pembangunan gedung Fakultas Olahraga dan Kesehatan pada tahun 2009 lalu. Indikasi permainannya, tanah dibeli Rp 6 juta per are, namun oleh panitia, harga tersebut di-*mark up* menjadi Rp 20 juta per are. Sehingga ada indikasi negara dirugikan puluhan miliar rupiah.

Sementara itu, sejumlah pihak yang terkait dengan penetapan tersangka kasus *markup* pengadaan tanah Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK) yang berada di Jinengdalem gagal dikonfirmasi. Yakni, tersangka I Wayan Suwarsa atau IWS sebagaimana diinisialkan Kejati Bali juga Nyoman Mustiara alias NM. Kedua ponsel kedua tersangka ini saat dihubungi koran ini Kamis kemarin (23/4) dalam kondisi aktif. Namun tidak memberikan jawaban apa pun,

bahkan beberapa kali dihubungi meski terdengar nada sambung, tidak juga menjawab. Koran ini juga mencoba mengirim pesan singkat (SMS), namun sayang hingga berita ini ditulis semalam, tidak juga ada jawaban dari keduanya.

Selain itu, mantan Rektor Undiksha Nyoman Suidiana yang menjadi penanggung jawab anggaran dalam pengadaan lahan kampus FOK Jinengdalem juga tidak memberikan keterangan. Ketika coba dihubungi, hanya terdengar nada sambung namun tidak mengangkat ponselnya. Sedangkan ketika coba dihubungi lagi berkali-kali ternyata malah sudah dialihkan. Dikirim SMS juga tidak ada jawaban. Diketahui, Suwarsa merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam kepanitiaan pengadaan lahan yang saat ini diusut Kejati Bali. Jabatan di kampus, Suwarsa sebagai Kabiro Administrasi dan Keuangan.

Sedangkan nama Mustiara, muncul sesuai dengan hasil investigasi *Jawa Pos Radar Bali* belum lama ini dengan peran sebagai makelar lahan yang dibeli Undiksha. (**art/hen/yes**)

Edisi : _____

Hal : _____